

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelayanan Kefarmasian di RS Katolik St. Vincentius A Paulo (RKZ) Surabaya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, yang meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta kegiatan pelayanan farmasi klinik.
2. Segenap tenaga penunjang teknis (Apoteker, TTK, pembantu farmasi) berperan penting dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, meliputi peran pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan, pengendalian, dan administrasi, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mahasiswa telah mengetahui dan memahami bagaimana peran TTK di Rumah Sakit dalam kegiatan pelayanan farmasi klinik, yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, rekonsiliasi obat, konseling, visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah.

B. Saran

1. Program telefarmasi merupakan program yang baru di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo Surabaya, agar bentuk pelayanan ini makin optimal, hendaknya untuk Apoteker selaku pelaksana proses penyiapan pengiriman dapat diberikan bantuan tenaga tambahan, agar obat lekas dikirim sehingga pasien juga dapat menerima obatnya lebih awal.
2. Karena Rumah Sakit St. Vincentius a Paulo Surabaya merupakan rumah

sakit swasta yang cukup besar dikelasnya, maka hendaknya secara rutin mengadakan kuisisioner secara *online* yang ditujukan kepada masyarakat Indonesia bagaimanakah tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna jasa kesehatan yang disediakan oleh Rumah Sakit ini, dan apakah yang dapat ditambahkan pada pelayanan, demi makin memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan baik perseorangan maupun kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Menkes, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Rumah sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia, 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021. Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia, 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Tentang Rumah Sakit*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5572. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Menkes, 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menkes, 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana Rumah Sakit.* Jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Menkes, 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan pelayanan Telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 890. Jakarta: Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Somantri, A. P. (2013). In *Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi RumahSakit "X."* Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kemenkes RI (2021) 'Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)', *Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021*, pp. 1–22.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 3, 2015, Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, Presiden RI, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Presiden RI, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2014, Undang-Undang Nomor 36 tentang Tenaga Kesehatan, Presiden RI, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72, 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56, 2014, Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.